

**RINGKASAN
DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

I. PENDAHULUAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Madiun Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut klasifikasi Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan serta belanja menurut kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Penyusunan PPAS Kabupaten Madiun tahun 2019 berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Dokumen PPAS memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah (PD) terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan.

II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana jumlah pendapatan yang tersedia tahun 2019, diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp **193.033.329.329,00**;
- b. Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp **1.626.022.684.425,00**;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp **321.012.587.660,00** dengan asumsi pendapatan dari Bagi Hasil Dari Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sama dengan tahun sebelumnya.

Dengan demikian secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp **2.140.068.601.414,00** .

Secara keseluruhan Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 yang meliputi proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara terinci disampaikan oleh tabel berikut :

Proyeksi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019

NO.	U R A I A N	R APBD TA 2019
1	2	3
I	PENDAPATAN	2.140.068.601.414,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.033.329.329,00
	a. Hasil Pajak Daerah	58.664.987.900,00
	b. Hasil Retribusi Daerah	10.369.218.480,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.025.797.079,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	119.973.325.870,00
2	Dana Perimbangan	1.626.022.684.425,00
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.442.608.650,00
	b. Dana Alokasi Umum	877.868.685.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	668.711.390.775,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	321.012.587.660,00
	a. Pendapatan Hibah	52.394.000.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.432.422.660,00
	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	160.881.185.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.304.980.000,00
II	BELANJA	2.136.590.721.487,00
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.120.630.766.414,00
	a. Belanja Pegawai	810.664.531.714
	b. Belanja Subsidi	515.000.000
	c. Belanja Hibah	14.592.867.500
	d. Belanja Bantuan Sosial	14.430.500.000
	e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	5.001.781.360
	f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota., Pemerintahan Desa dan Parpol	274.426.085.840
	g. Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
2	BELANJA LANGSUNG	1.015.959.955.073,00
	a. Belanja Pegawai	11.367.200.000,00

NO.	U R A I A N		R APBD TA 2019
1	2		3
	b.	Belanja Barang dan Jasa	425.547.317.493,00
	c.	Belanja Modal	579.045.437.580,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.477.879.927,00
III	PEMBIAYAAN DAERAH		
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		1.522.120.073,00
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1.422.120.073,00
	b.	Pencairan Dana Cadangan	-
	c.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	100.000.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		5.000.000.000,00
	a.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		(3.477.879.927,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Mendasari Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2019 dan menyikapi Isu Strategis yang ada, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan serta usaha jasa peralatan berbasis pertanian terpadu	Dinas Pertanian dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani Program Pengembangan Perkebunan Program Pengembangan Hortikultura Program Pengembangan Peternakan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM
1	2	3	4	5
		Peningkatan kemitraan Usaha Mikro dalam rangka penguatan kemampuan managerial, teknologi, permodalan dan pemasaran	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan Usaha Mikro Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
		Peningkatan kualitas dan Pemberdayaan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan Koperasi
		Peningkatan daya tarik industri kreatif berbasis sumberdaya lokal daerah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Program pengembangan industri kecil dan menengah
		Peningkatan Perluasan jaringan pasar dan promosi produksi daerah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengelolaan Pasar Daerah
		Peningkatan jaminan kepastian hukum bagi investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Pengembangan destinasi pariwisata unggulan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
		Peningkatan kelembagaan pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan pemasaran dan industri pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata
		Pengembangan seni budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya
2	Pemantapan Ketahanan Energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.	Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan daya dukung kawasan lindung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemfaatan Tanah
		Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan
		Program Pengembangan,	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM
1	2	3	4	5
		Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.	Terpadu Satu Pintu	Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan Tanaman Pangan.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Program Pengembangan Tanaman Pangan
3	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.	Pengembangan metode pembelajaran yang inovatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Non Formal				
Program Pendidikan SD				
Program Pendidikan SMP				
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat		Dinas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	
			Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
Program pelayanan Kesehatan				
Penanganan Fakir miskin dan penyandang masalah sosial		Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
Penguatan pengarusutamaan gender		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	
Pengembangan perumahan layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan permukiman		
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Public services	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Program Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
4	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui	Penanganan wilayah kumuh dengan pemberdayaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan permukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	SKPD YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM
1	2	3	4	5
	Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.	komunitas perumahan		
		Penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Pemukiman
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
		Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah, air bersih dan penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Limbah Domestik
				Program Perlindungan Fungsi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber daya Hayati dan Adaptasi serta Mitigasi Perubahan Iklim
5	Stabilitas keamanan Nasional dan kesuksesan pemilu.	Optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		Penegakan Produk Hukum Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penegakan Produk Hukum Daerah
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan kehidupan Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan kehidupan Beragama

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019

Kode					Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	01				Pendidikan	137,188,784,084
1	01	1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	137,188,784,084
1	02				Kesehatan	254,285,548,788
1	02	1	02	01	Dinas Kesehatan	92,732,313,947
1	02	1	02	02	RSUD Caruban	93,933,369,922
1	02	1	02	03	RSUD Dolopo	67,619,864,919
1	03				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408,165,299,070
1	03	1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408,165,299,070
1	04				Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12,000,733,068
1	04	1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12,000,733,068
1	05				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7,447,943,591
1	05	1	05	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,831,460,180
1	05	1	05	02	Satuan Polisi Pamong Praja	3,368,535,691
1	05	1	06	02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,247,947,720
1	06				Sosial	4,568,363,153
1	06	1	06	01	Dinas Sosial	4,568,363,153
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2	01				Tenaga Kerja	2,595,001,271
2	01	2	01	01	Dinas Tenaga Kerja	2,595,001,271

Kode					Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2	02				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,407,755,406
2	02	2	02	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,407,755,406
2	03				Pangan	2,133,655,819
2	03	2	03	01	Dinas Ketahanan Pangan	2,133,655,819
2	05				Lingkungan Hidup	11,403,217,422
2	05	2	05	01	Dinas Lingkungan Hidup	11,403,217,422
2	06				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,520,872,152
2	06	2	06	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,520,872,152
2	07				Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,621,205,046
2	07	2	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,621,205,046
2	08				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,131,221,355
2	08	2	02	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,131,221,355
2	09				Perhubungan	22,847,595,848
2	09	2	09	01	Dinas Perhubungan	22,847,595,848
2	10				Komunikasi dan Informatika	4,713,838,345
2	10	2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,713,838,345
2	11				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,904,457,723
2	11	2	11	01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4,904,457,723
2	12				Penanaman Modal	1,523,287,039
2	12	2	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,523,287,039
2	13				Kepemudaan dan Olah Raga	2,370,077,543

Kode					Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2	13	2	13	01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2,370,077,543
2	14				Statistik	755,634,400
2	14	2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	755,634,400
2	15				Persandian	129.307.755
2	15	2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	129.307.755
2	16				Kebudayaan	1,960,358,388
2	16	1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,960,358,388
2	17				Perpustakaan	2,241,550,166
2	17	2	17	01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2,241,550,166
2	18				Kearsipan	267.404.130
2	18	2	17	01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	267.404.130
3					Urusan Pilihan	
3	01				Kelautan dan Perikanan	1,187,635,015
3	01	3	03	01	Dinas Pertanian dan Perikanan	1,187,635,015
3	02				Pariwisata	4,400,503,205
3	02	2	13	01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	4,400,503,205
3	03				Pertanian	22,901,953,372
3	03	3	03	01	Dinas Pertanian dan Perikanan	22,901,953,372
3	05				Energi dan Sumberdaya Mineral	252.463.400
3	05	2	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	252.463.400
3	06				Perdagangan	1,256,491,600
3	06	2	11	01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1,256,491,600
3	07				Perindustrian	250.645.750
3	07	2	11	01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	250.645.750

Kode					Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3	08				Transmigrasi	1,544,276,460
3	08	2	01	01	Dinas Tenaga Kerja	1,544,276,460
4					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
4	01				Administrasi Pemerintahan	61,403,996,721
4	01	4	01	03	Sekretariat Daerah	31,932,110,227
4	01	4	01	04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,865,251,574
4	01	4	01	05	Kecamatan Balerejo	606,051,850
4	01	4	01	06	Kecamatan Dagangan	485.976.316
4	01	4	01	07	Kecamatan Dolopo	1,595,913,821
4	01	4	01	08	Kecamatan Geger	570,896,698
4	01	4	01	09	Kecamatan Gemarang	424.500.401
4	01	4	01	10	Kecamatan Jiwan	479.525.089
4	01	4	01	11	Kecamatan Kebonsari	462.786.614
4	01	4	01	12	Kecamatan Kare	726,096,321
4	01	4	01	13	Kecamatan Madiun	903,045,199
4	01	4	01	14	Kecamatan Mejayan	1,666,203,165
4	01	4	01	15	Kecamatan Pilangkenceng	722,590,179
4	01	4	01	16	Kecamatan Sawahan	601,188,922
4	01	4	01	17	Kecamatan Saradan	544,496,698
4	01	4	01	18	Kecamatan Wungu	2,291,862,544
4	01	4	01	19	Kecamatan Wonoasri	525.501.103
4	02				Pengawasan	1,931,495,022
4	02	4	01	04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99.615.500
4	02	4	02	01	Inspektorat	1,831,879,522

Kode					Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
4	03				Perencanaan	5,228,529,134
4	03	4	03	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,228,529,134
4	04				Keuangan	11,909,566,349
4	04	4	04	01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6,003,880,504
4	04	4	04	02	Badan Pendapatan Daerah	5,905,685,845
4	05				Kepegawaian	4,697,211,283
4	05	4	05	01	Badan Kepegawaian Daerah	4,697,211,283
4	07				Penelitian dan Pengembangan	812,076,200
4	07	4	03	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	812,076,200

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2019

NO.	U R A I A N	APBD TAHUN 2017 (Rp)	APBD TAHUN 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30,461,241,442.00	33,011,458,360.00	8.37
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	29,961,241,442	2,190,297,000.00	(92.69)
	b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	500,000,000	500,000,000	-
	c. Penerimaan Dana Cadangan	-	30,321,161,360	3,032.12
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,500,000,000.00	7,000,000,000.00	(55.56)

	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,500,000,000	7,000,000,000.00	250
	PEMBIAYAAN NETTO	25,961,241,442.00	26,011,458,360.00	(0.19)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-